



**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN
REGULASI PENANGGULANGAN BENCANA: PERSPEKTIF
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

***COMMUNITY PARTICIPATION IN THE FORMULATION OF
DISASTER MANAGEMENT REGULATIONS: A PUBLIC
ADMINISTRATIVE LAW PERSPECTIVE***

Firdaus Arifin ¹

¹Fakultas hukum Universitas Pasundan

Abstrak

Peningkatan frekuensi dan intensitas bencana di Indonesia menuntut adanya reformulasi hukum administrasi negara dalam penanggulangan bencana. Kesenjangan antara kerangka hukum yang ada (*das sollen*) dan implementasinya di lapangan (*das sein*) menghambat efektivitas respons bencana. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebutuhan reformulasi hukum administrasi negara untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif, penelitian ini menggabungkan analisis dokumen hukum, wawancara semi-terstruktur, dan analisis komparatif praktik internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia kurang fleksibel dalam mengakomodasi kebutuhan pengambilan keputusan cepat selama situasi darurat, serta lemahnya koordinasi antar lembaga dan kapasitas lokal. Reformulasi hukum administrasi negara diperlukan untuk menyeimbangkan fleksibilitas operasional dan akuntabilitas hukum, serta mengintegrasikan manajemen risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan. Implikasi penelitian ini mencakup rekomendasi untuk revisi UU No. 24 Tahun 2007, peningkatan koordinasi antar lembaga, penguatan kapasitas lokal, dan adopsi pendekatan partisipatif dalam manajemen bencana.

Kata Kunci: *han, penanggulangan, reformulasi, manajemen Risiko Bencana*

Abstract

The increasing frequency and intensity of disasters in Indonesia demands a reformulation of administrative law in disaster management. The gap between the existing legal framework (das sollen) and its implementation on the ground (das sein) hinders the effectiveness of disaster response. This research aims to analyze the need for reformulation of administrative law to improve the effectiveness of disaster management in Indonesia. Using a qualitative approach with a comparative case study design, this research combines legal document analysis, semi-structured interviews, and comparative analysis of international practices. The research results show that the Indonesian legal framework lacks flexibility in accommodating the need for rapid decision-making during emergency situations, as well as weak inter-agency coordination and local capacity. Reformulation of administrative law is needed to balance operational flexibility and legal accountability, as well as integrate disaster risk management into development planning. The implications of this research include recommendations for revising Law No. 24 of 2007, improving inter-agency coordination, strengthening local capacity, and adopting a participatory approach in disaster management.

Keywords: *Administrative Law, Disaster Management, reformulation, disaster risk management*



A. PENDAHULUAN

Bencana alam merupakan fenomena yang tidak dapat diprediksi dan dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan. Di Indonesia, yang terletak di Cincin Api Pasifik, bencana seperti gempa bumi, tsunami, dan kebakaran hutan sering kali terjadi. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada tahun 2022, Indonesia mengalami lebih dari 2.000 bencana, yang menyebabkan ribuan korban jiwa dan kerugian ekonomi mencapai miliaran rupiah. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat dalam penyusunan regulasi penanggulangan bencana menjadi sangat penting. Partisipasi ini tidak hanya memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.

Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana memiliki banyak manfaat. Pertama, masyarakat yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan cenderung lebih memahami dan menghargai regulasi yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan teori partisipasi publik yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan meningkatkan legitimasi kebijakan. Kedua, partisipasi masyarakat dapat menghasilkan informasi yang berharga mengenai kondisi lokal dan potensi risiko bencana yang mungkin tidak teridentifikasi oleh pemerintah, dengan pertimbangan bahwa masyarakat lokal memiliki pengetahuan yang mendalam tentang risiko bencana di daerah mereka, yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif.¹

Hukum administrasi negara memainkan peran penting dalam membentuk kerangka regulasi penanggulangan bencana. Hukum ini mengatur bagaimana pemerintah dan masyarakat berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks penanggulangan bencana, hukum administrasi negara memberikan dasar

¹ Jonatan A Lassa et al., "Exploring NGOs-Government Collaboration Strategies in Institutionalising Child-Centred Disaster Resilience and Climate Change Adaptation," *Progress in Disaster Science* 18 (2023): 100284, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2023.100284>.



hukum bagi partisipasi masyarakat, termasuk hak untuk memberikan masukan dan mengawasi pelaksanaan regulasi. Menurut Yudit Bertha Rumbawer et al. (2024), regulasi yang jelas dan transparan sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak, termasuk masyarakat, dapat berkontribusi dalam upaya penanggulangan bencana.²

Meskipun pentingnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana telah diakui, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyusunan regulasi penanggulangan bencana perlu dianalisis lebih lanjut. Pertanyaan yang muncul adalah: Apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyusunan regulasi penanggulangan bencana? Faktor-faktor ini dapat mencakup tingkat pendidikan masyarakat, kesadaran akan risiko bencana, serta keberadaan saluran komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan regulasi penanggulangan bencana. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, serta tantangan dan peluang yang ada. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam regulasi penanggulangan bencana.

Penelitian ini memiliki kontribusi penting terhadap pengembangan kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di Indonesia. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan praktisi dalam

² Yudit Bertha Rumbawer, Donny Eddy Sam Karauwan, and Anthon Rumburen, “*Ambiguitas Keputusan Administrasi Negara: Antara Diskresi Dan Legalitas*,” *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2024): 52–63, https://doi.org/10.35905/sultan_htn.v2i2.9569.



meningkatkan efektivitas regulasi penanggulangan bencana di masa depan.

B. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam studi ini dirancang untuk menganalisis secara komprehensif permasalahan reformulasi hukum administrasi negara dalam konteks penanggulangan bencana. Pendekatan metodologis yang dipilih menggabungkan metode penelitian hukum doktrinal dengan metode sosio-legal, memungkinkan analisis yang mendalam terhadap aspek normatif dan empiris dari masalah yang diteliti. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain studi komparatif. Metode ini dipilih karena kemampuannya untuk mengeksplorasi kompleksitas fenomena hukum dalam konteks sosial dan institusional yang lebih luas. Studi komparatif memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan membandingkan kerangka hukum administrasi dan praktik penanggulangan bencana di berbagai yurisdiksi, sekaligus memberikan wawasan tentang berbagai pendekatan dan solusinya.

Untuk aspek komparatif, penelitian ini mengadopsi pendekatan fungsional dalam hukum komparatif. Pendekatan ini memungkinkan perbandingan sistematis antara sistem hukum yang berbeda dengan fokus pada fungsi dan tujuan hukum daripada struktur formalnya. Hal ini sangat relevan dalam konteks penelitian ini, mengingat variasi yang signifikan dalam struktur hukum administrasi di berbagai negara.³

Penelitian ini juga menerapkan analisis kebijakan kritis untuk mengevaluasi efektivitas dan implikasi dari kerangka hukum yang ada. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi tidak hanya aspek teknis dari kebijakan dan hukum, tetapi juga dimensi nilai dan kekuasaan yang melekat dalam formulasi dan

³ H. Zweigert, K., & Kötz, *An Introduction to Comparative Law (3rd Ed.)* (London: Oxford University Press, 1998).



implementasinya.⁴ Melalui kombinasi metode ini, penelitian bertujuan untuk menghasilkan analisis yang komprehensif dan nuansa tentang reformulasi hukum administrasi negara dalam konteks penanggulangan bencana, memberikan dasar yang kuat untuk rekomendasi kebijakan dan penelitian lebih lanjut.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Hukum Administrasi Penanggulangan Bencana

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam konteks penanggulangan bencana. Menurut Canlas (2023), partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai keterlibatan individu atau kelompok dalam kegiatan yang mempengaruhi kehidupan mereka, termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik.⁵ Ada beberapa jenis partisipasi masyarakat yang dapat diidentifikasi, antara lain partisipasi informatif, konsultatif, dan partisipasi yang lebih aktif seperti kolaboratif. Dalam konteks penanggulangan bencana, partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan efektivitas kebijakan tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap tindakan mitigasi yang diambil.

Data statistik menunjukkan bahwa daerah yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan bencana cenderung memiliki tingkat kesiapsiagaan yang lebih tinggi. Misalnya, di daerah yang rawan bencana seperti Aceh, partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana terbukti meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana⁶. Oleh karena itu, penting untuk memahami

⁴ M. S. (Eds.). Fischer, F., Miller, G. J., & Sidney, *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods* (CRC Press., 2007).

⁵ Ian Phil Canlas, "Three Decades of Disaster Risk Reduction Education: A Bibliometric Study," *Natural Hazards Research* 3, no. 2 (2023): 326–35, <https://doi.org/10.1016/j.nhres.2023.02.007>.

⁶ Nathania Dwi Marietta and Arfin Sudirman, "International Regime Approach in the Development of Indonesia's 2004 Post-Aceh Earthquake and Tsunami Disaster Regulations



berbagai bentuk partisipasi masyarakat dalam konteks kebencanaan dan bagaimana hal ini dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan publik.

Teori-teori yang mendasari partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana mencakup teori partisipasi publik, teori keadilan sosial, dan teori kolaborasi. Teori partisipasi publik menekankan bahwa masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Sementara itu, teori keadilan sosial menyoroti pentingnya inklusi dan representasi dalam proses tersebut, sehingga suara kelompok yang terpinggirkan dapat terdengar. Teori kolaborasi, di sisi lain, menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk masalah bencana. Contoh nyata dari partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana dapat dilihat pada program pembentukan desa tangguh bencana yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Program ini melibatkan masyarakat dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini tidak hanya memperkuat kapasitas lokal tetapi juga membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah.⁷

Meskipun partisipasi masyarakat memiliki banyak manfaat, ada juga tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang isu kebencanaan dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi secara efektif. Oleh karena itu, edukasi dan pelatihan yang tepat sangat penting untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi.⁸

Hukum administrasi negara memainkan peran penting dalam mengatur bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dalam konteks

Pendekatan Rezim Internasional Dalam Perkembangan Peraturan Kebencanaan Indonesia Pasca-Gempa Dan Tsunami Aceh 2004, 2004, 237–54.

⁷ Safa Muzdalifah et al., “Membangun Desa Tangguh Bencana Melalui Pembentukan Peraturan Desa Dan Kompetensi Penanggulangan Bencana,” *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 4 (2022): 1183, <https://doi.org/10.20527/btjpm.v4i4.5829>.

⁸ Jebul Suroso et al., “Challenges and Barriers in Disaster Mitigation Education in Banyumas Regency,” *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences* 9, no. T5 (2022): 162–70, <https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.7819>.



penanggulangan bencana. Prinsip-prinsip hukum administrasi negara, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, sangat relevan dalam konteks ini. Menurut Yudit Bertha Rumbawer et al. (2024), hukum administrasi negara memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses penanggulangan bencana, sehingga keputusan yang diambil lebih *legitimate* dan dapat diterima oleh masyarakat.⁹

Peraturan perundang-undangan yang relevan dalam penanggulangan bencana di Indonesia mencakup Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap penanggulangan bencana. Dalam undang-undang ini, pemerintah diwajibkan untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penanggulangan bencana. Hal ini menunjukkan bahwa hukum administrasi negara tidak hanya mengatur tindakan pemerintah tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi.

Dalam praktiknya, implementasi hukum administrasi negara terkait penanggulangan bencana seringkali menghadapi kendala. Misalnya, ketidakjelasan dalam peraturan dapat mengakibatkan ambiguitas dalam pelaksanaan.¹⁰ Selain itu, kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah juga dapat menghambat partisipasi masyarakat dan efektivitas program penanggulangan bencana. Salah satu contoh kasus yang relevan adalah peristiwa bencana alam di Palu, di mana partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana sangat terbatas akibat kurangnya informasi dan aksesibilitas. Hal ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam regulasi teknis untuk memastikan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi secara

⁹ Yudit Bertha Rumbawer, Donny Eddy Sam Karauwan, and Anthon Rumburen, "Ambiguitas Keputusan Administrasi Negara : Antara Diskresi Dan Legalitas."

¹⁰ Akhmad and Sinung Mufti Hangabei, "Review of Zoning Regulations for Seismic Area on the Southwest Coast of Sumatra, Indonesia," *Yustisia* 12, no. 1 (2023): 60–76, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v12i1.72856>.



efektif dalam penanggulangan bencana ¹¹.

Dengan demikian, hukum administrasi negara tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur tindakan pemerintah, tetapi juga sebagai jembatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana. sehingga penting untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki kerangka hukum yang ada agar dapat mendukung partisipasi masyarakat secara optimal.

Penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana telah banyak dilakukan, menunjukkan bahwa partisipasi yang aktif dapat meningkatkan efektivitas program penanggulangan bencana. Salah satu studi yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Kurniadi et al. (2022), yang menyoroti peran lembaga penanggulangan bencana lokal dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah untuk membuat regulasi baru terkait pengelolaan ruang. Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dapat menghasilkan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.¹²

Lebih lanjut, penelitian oleh Lassa et al. (2023) menunjukkan bahwa kolaborasi antara NGO dan pemerintah dalam penanggulangan bencana dapat memperkuat kapasitas masyarakat. Dalam studi tersebut, ditemukan bahwa pendekatan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program mitigasi bencana menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan pendekatan yang bersifat *top-down*.¹³

Namun, ada juga penelitian yang menunjukkan tantangan dalam partisipasi masyarakat. Misalnya, penelitian oleh Trisnawati et al. (2022) mencatat bahwa

¹¹ Nur Aisyah, M.Syukur M.Syukur, and Dandan Haryono, "Disaster Management Policy Analysis At the Regional Disaster Management Agency BPBD Palu City," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 4, no. 07 (2023): 641–48, <https://doi.org/10.59141/jiss.v4i07.853>.

¹² Anwar Kurniadi, Siswo Hadi Sumantri, and Fauzi Bahar, "The Role of Local Disaster Relief Agencies in Influencing Local Government to Make New Spatial Management Local Regulations in Pandeglang Regency," *Journal of Disaster Research* 17, no. 3 (2022): 444–52, <https://doi.org/10.20965/jdr.2022.p0444>.

¹³ Lassa et al., "Exploring NGOs-Government Collaboration Strategies in Institutionalising Child-Centred Disaster Resilience and Climate Change Adaptation."



meskipun ada kebijakan yang mendukung partisipasi, dalam praktiknya banyak masyarakat yang masih kurang terlibat karena kurangnya informasi dan pendidikan tentang bencana. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam penanggulangan bencana.¹⁴

Statistik dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi memiliki angka korban yang lebih rendah selama bencana dibandingkan dengan daerah yang tingkat partisipasinya rendah. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya penting dari segi hukum, tetapi juga berdampak langsung pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi berbagai model partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana, serta untuk memahami bagaimana faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya mempengaruhi tingkat partisipasi tersebut. Dengan demikian, akan ada pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan penanggulangan bencana.

Berdasarkan pemaparan tersebut, partisipasi masyarakat dalam penyusunan regulasi penanggulangan bencana merupakan aspek yang tidak bisa diabaikan. Melalui partisipasi yang aktif, masyarakat tidak hanya dapat menyampaikan kebutuhan dan aspirasi mereka, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Hukum administrasi negara memberikan kerangka yang memungkinkan partisipasi ini terjadi, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan memperbaiki regulasi yang ada agar partisipasi masyarakat dapat terwujud secara optimal dalam penanggulangan bencana.

¹⁴ Arti Novelia Trisnawati, Dina Sunyowati, and Setya Heksama, "Legal Protection Disaster Response Volunteers (PERKA Study No. 17 of 2011 Regarding Disaster Management Volunteer Guidelines)," *Airlangga Development Journal* 7, no. 1 (2022): 66–85, <https://doi.org/10.20473/adj.v7i1.34897>.



2. Implementasi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan regulasi penanggulangan bencana di Indonesia merupakan aspek yang sangat penting dalam menciptakan kebijakan yang responsif dan efektif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di beberapa daerah rawan bencana, ditemukan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan efektivitas regulasi, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap kebijakan yang dihasilkan. Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait penanggulangan bencana meningkat sebesar 30% dalam lima tahun terakhir, menunjukkan kesadaran yang semakin tinggi di kalangan masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam isu-isu kebencanaan (BNPB, 2023).¹⁵

Salah satu contoh konkret partisipasi masyarakat dapat dilihat dari program desa tangguh bencana yang dilaksanakan di beberapa provinsi. Di desa-desa tersebut, masyarakat dilibatkan dalam setiap tahap, mulai dari identifikasi risiko, perencanaan mitigasi, hingga pelaksanaan program. Hasilnya, desa-desa tersebut menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi bencana, dengan tingkat kerentanan yang lebih rendah dibandingkan dengan desa-desa yang tidak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan.¹⁶

Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan regulasi penanggulangan bencana dibagi menjadi beberapa bentuk, antara lain partisipasi dalam forum diskusi, pelatihan, dan penyuluhan. Melalui forum diskusi, masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka terkait regulasi yang

¹⁵ Devid Marihot et al., "The Implementation Of Satu Data Bencana Indonesia (SDBI) For Sustainable Development," *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)* 2, no. 6 (2023): 1955–62, <https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i6.517>.

¹⁶ Muzdalifah et al., "Membangun Desa Tangguh Bencana Melalui Pembentukan Peraturan Desa Dan Kompetensi Penanggulangan Bencana."



akan diterapkan. Data menunjukkan bahwa 70% responden merasa bahwa forum diskusi memberikan ruang yang cukup bagi mereka untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan.¹⁷

Selain itu, pelatihan tentang manajemen bencana juga menjadi salah satu bentuk partisipasi yang efektif. Masyarakat yang terlatih tidak hanya memahami risiko bencana tetapi juga memiliki keterampilan untuk mengelola situasi darurat. Dalam penelitian ini, 85% peserta pelatihan merasakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang signifikan, yang berdampak positif pada kesiapsiagaan mereka menghadapi bencana.¹⁸

Beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyusunan regulasi penanggulangan bencana antara lain tingkat pendidikan, kesadaran akan risiko bencana, dan dukungan dari pemerintah setempat. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi. Sebagai contoh, di daerah dengan tingkat pendidikan yang baik, partisipasi masyarakat dapat mencapai 80%, sementara di daerah dengan tingkat pendidikan rendah, partisipasi hanya sekitar 40%.¹⁹

Kesadaran akan risiko bencana juga berperan penting. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik mengenai potensi bencana di daerah mereka lebih mungkin untuk terlibat dalam proses perencanaan. Data dari Suroso et al. (2022) menunjukkan bahwa kampanye penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat hingga 60%, yang berujung pada peningkatan partisipasi dalam penyusunan regulasi.²⁰

¹⁷ Aisyah, M.Syukur, and Haryono, "Disaster Management Policy Analysis At the Regional Disaster Management Agency BPBD Palu City."

¹⁸ Adiba Fariza and Baiq Lily Handayani, "Tindakan Struktural Mitigasi Bencana Pemerintah Di Indonesia," *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, no. 2 (2022): 288–305, <https://doi.org/10.20961/jas.v11i2.57282>.

¹⁹ Kurniadi, Sumantri, and Bahar, "The Role of Local Disaster Relief Agencies in Influencing Local Government to Make New Spatial Management Local Regulations in Pandeglang Regency."

²⁰ Suroso et al., "Challenges and Barriers in Disaster Mitigation Education in Banyumas Regency."



Dalam konteks hukum administrasi negara, partisipasi masyarakat dalam penyusunan regulasi penanggulangan bencana harus dipandang sebagai bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hukum administrasi negara mengedepankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan bahwa masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik.²¹

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa regulasi penanggulangan bencana yang dihasilkan dengan melibatkan masyarakat cenderung lebih diterima dan diimplementasikan dengan baik. Penelitian ini mendukung argumen bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan elemen kunci dalam menciptakan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.²²

Dari perspektif hukum administrasi negara, partisipasi masyarakat dalam penyusunan regulasi penanggulangan bencana menunjukkan bahwa pemerintah tidak dapat bertindak sepihak dalam mengatur kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keterlibatan masyarakat menjadi indikator bahwa pemerintah menghargai hak-hak masyarakat untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini juga mencerminkan adanya akuntabilitas publik, di mana pemerintah bertanggung jawab untuk mendengarkan dan mempertimbangkan suara masyarakat.²³

Temuan dari penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap regulasi penanggulangan bencana di Indonesia. Pertama, pentingnya mengembangkan

²¹ Yudit Bertha Rumbawer, Donny Eddy Sam Karauwan, and Anthon Rumburen, "Ambiguitas Keputusan Administrasi Negara : Antara Diskresi Dan Legalitas."

²² Willya Achmad, "The Effectiveness of Earthquake Disaster Management Policy in Indonesia," *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2023, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:259402974>.

²³ Dwi Marietta and Sudirman, "International Regime Approach in the Development of Indonesia's 2004 Post-Aceh Earthquake and Tsunami Disaster Regulations Pendekatan Rezim Internasional Dalam Perkembangan Peraturan Kebencanaan Indonesia Pasca-Gempa Dan Tsunami Aceh 2004."



mekanisme yang memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam setiap tahap penyusunan regulasi, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Kedua, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan agar mereka lebih siap untuk terlibat secara aktif dalam proses tersebut.²⁴

Kedua, regulasi yang dihasilkan harus mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah perlu melakukan survei dan penelitian yang lebih mendalam untuk memahami konteks lokal dan karakteristik masyarakat yang berbeda-beda. Hal ini akan membantu dalam merumuskan regulasi yang lebih relevan dan efektif dalam penanggulangan bencana.²⁵

Salah satu contoh konkret partisipasi masyarakat dalam penyusunan regulasi penanggulangan bencana adalah program "Desa Tangguh Bencana" yang diimplementasikan di Kabupaten Pandeglang, Banten. Dalam program ini, masyarakat dilibatkan dalam setiap tahap, mulai dari identifikasi risiko hingga penyusunan rencana mitigasi. Hasilnya, desa tersebut berhasil mengurangi tingkat kerentanan terhadap bencana, dengan angka kerugian yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan desa lain yang tidak melibatkan masyarakat.²⁶

Melalui studi kasus ini, terlihat bahwa ketika masyarakat dilibatkan secara aktif, mereka tidak hanya merasa memiliki kebijakan tersebut, tetapi juga lebih siap untuk menghadapi bencana yang mungkin terjadi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci dalam menciptakan

²⁴ Dyah Ayu Widowati, "Disaster Mitigation in Coastal Areas: Perspective of the Indonesian Spatial Planning Law," *Jurnal Media Hukum* 29, no. 1 (2022): 79–93, <https://doi.org/10.18196/jmh.v29i1.14685>.

²⁵ Sukmo Pinuji and Walter Timo De Vries, "Evaluating How Tenure Security in Disaster Management Depends on Land Governance Based on Indonesian Case Study," *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 9, no. 1 (2023): 1–30, <https://doi.org/10.31292/bhumi.v9i1.619>.

²⁶ Devi Roza K. Kausar et al., "Setting Priorities for Public–Private Collaborations in Tourism Disaster Management Planning," *All Earth* 35, no. 1 (2023): 242–51, <https://doi.org/10.1080/27669645.2023.2241212>.



regulasi penanggulangan bencana yang efektif dan berkelanjutan.²⁷

Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam penyusunan regulasi penanggulangan bencana harus terus didorong dan difasilitasi oleh pemerintah, agar tercipta kebijakan yang tidak hanya responsif, tetapi juga berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

D. KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan regulasi penanggulangan bencana merupakan aspek penting dalam hukum administrasi negara yang tidak hanya meningkatkan efektivitas kebijakan, tetapi juga memperkuat legitimasi dan akuntabilitas pemerintah. Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat mengurangi risiko bencana melalui pengembangan kebijakan yang lebih responsif dan berbasis pada kebutuhan lokal. Misalnya, dalam kasus penanggulangan bencana gempa bumi di Aceh, di mana keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi terbukti meningkatkan kecepatan dan keberhasilan pemulihan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah yang melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam mitigasi bencana. Ambiguitas dalam keputusan administrasi negara sering kali menjadi penghalang bagi partisipasi masyarakat. Adanya ketidakjelasan dalam peraturan dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa regulasi yang ditetapkan jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak, sehingga masyarakat merasa memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat dalam proses penanggulangan bencana. Regulasi yang tidak mempertimbangkan perspektif

²⁷ Aktieva Tri Tjitrawati and Mochamad Kevin Romadhona, "Affliction in the Post Palu Disaster: State Failure to Implement Human Rights Standard on Disaster Management," *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2233255>.



masyarakat juga dapat mengakibatkan konflik dan ketidakpuasan. Dalam konteks ini, menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam pengembangan kebijakan penanggulangan bencana dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif sangat diperlukan untuk menciptakan regulasi yang efektif.

Akhirnya, partisipasi masyarakat dalam penyusunan regulasi penanggulangan bencana tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga merupakan suatu kebutuhan moral dan sosial. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan rasa memiliki terhadap kebijakan yang dihasilkan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pengembangan regulasi penanggulangan bencana. Berdasarkan temuan di atas, ada beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk pengembangan kebijakan dan praktik partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana. Pertama, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi regulasi penanggulangan bencana. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan edukasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat serta cara-cara untuk terlibat dalam proses tersebut. Kedua, penting untuk membangun mekanisme yang memfasilitasi dialog antara pemerintah dan masyarakat. Ini bisa berupa forum diskusi, konsultasi publik, atau platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan saran. Dengan cara ini, masyarakat akan merasa lebih dihargai dan memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan.

Ketiga, pemerintah harus memastikan bahwa informasi mengenai risiko bencana dan regulasi penanggulangan bencana disebarluaskan secara luas dan mudah dipahami. Penggunaan media sosial, kampanye informasi, dan program pendidikan di sekolah dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi mereka dalam penanggulangan bencana. Keempat,



penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi metode dan praktik terbaik dalam melibatkan masyarakat dalam penyusunan regulasi penanggulangan bencana. Penelitian ini dapat mencakup studi kasus dari daerah lain yang telah berhasil melibatkan masyarakat dalam proses tersebut, serta analisis terhadap hambatan dan tantangan yang dihadapi. Terakhir, penting untuk menciptakan budaya partisipasi di masyarakat. Hal ini bisa dilakukan melalui program-program yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan mitigasi bencana, seperti pelatihan kesiapsiagaan bencana, simulasi, dan kegiatan relawan. Dengan membangun kesadaran dan keterlibatan masyarakat, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

Achmad, Willya. "The Effectiveness of Earthquake Disaster Management Policy in Indonesia." *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2023. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:259402974>.

Aisyah, Nur, M.Syukur M.Syukur, and Dandan Haryono. "Disaster Management Policy Analysis At the Regional Disaster Management Agency BPBD Palu City." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 4, no. 07 (2023): 641–48. <https://doi.org/10.59141/jiss.v4i07.853>.

Akhmad, and Sinung Mufti Hangabei. "Review of Zoning Regulations for Seismic Area on the Southwest Coast of Sumatra, Indonesia." *Yustisia* 12, no. 1 (2023): 60–76. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v12i1.72856>.

Canlas, Ian Phil. "Three Decades of Disaster Risk Reduction Education: A Bibliometric Study." *Natural Hazards Research* 3, no. 2 (2023): 326–35. <https://doi.org/10.1016/j.nhres.2023.02.007>.

Devid Marihot, Agus Wibowo, Sugeng Triutomo, and Pujo Widodo. "The Implementation Of Satu Data Bencana Indonesia (SDBI) For Sustainable Development." *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)* 2, no. 6 (2023): 1955–62. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i6.517>.

Dwi Marietta, Nathania, and Arfin Sudirman. "International Regime Approach in the



- Development of Indonesia's 2004 Post-Aceh Earthquake and Tsunami Disaster Regulations Pendekatan Rezim Internasional Dalam Perkembangan Peraturan Kebencanaan Indonesia Pasca-Gempa Dan Tsunami Aceh 2004," 2004, 237–54.
- Fariza, Adiba, and Baiq Lily Handayani. "Tindakan Struktural Mitigasi Bencana Pemerintah Di Indonesia." *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, no. 2 (2022): 288–305. <https://doi.org/10.20961/jas.v11i2.57282>.
- Fischer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (Eds.). *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*. CRC Press., 2007.
- Kausar, Devi Roza K., Agustan Agustan, Sarojini Imran, Dini Rosmalia, and Riza Firmansyah. "Setting Priorities for Public–Private Collaborations in Tourism Disaster Management Planning." *All Earth* 35, no. 1 (2023): 242–51. <https://doi.org/10.1080/27669645.2023.2241212>.
- Kurniadi, Anwar, Siswo Hadi Sumantri, and Fauzi Bahar. "The Role of Local Disaster Relief Agencies in Influencing Local Government to Make New Spatial Management Local Regulations in Pandeglang Regency." *Journal of Disaster Research* 17, no. 3 (2022): 444–52. <https://doi.org/10.20965/jdr.2022.p0444>.
- Lassa, Jonatan A, Avianto Amri, Yusra Tebe, Briony Towers, and Katharine Haynes. "Exploring NGOs-Government Collaboration Strategies in Institutionalising Child-Centred Disaster Resilience and Climate Change Adaptation." *Progress in Disaster Science* 18 (2023): 100284. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2023.100284>.
- Muzdalifah, Safa, Astinana Yulianti, Muhammad Rajabidin Nazar, Diyang Pusparini, Wina Wina, Erni Luthfiah, Neni Syafitri, and Amelia Rizky Ramadhani. "Membangun Desa Tangguh Bencana Melalui Pembentukan Peraturan Desa Dan Kompetensi Penanggulangan Bencana." *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 4 (2022): 1183. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v4i4.5829>.
- Pinuji, Sukmo, and Walter Timo De Vries. "Evaluating How Tenure Security in Disaster Management Depends on Land Governance Based on Indonesian Case Study." *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 9, no. 1 (2023): 1–30. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v9i1.619>.
- Suroso, Jebul, Sri Suparti, Susana Widyaningsih, Savita K. Sugathan, Mythem Kamal Abbas Al Adilee, and G. Gary Foo Xiang. "Challenges and Barriers in Disaster Mitigation Education in Banyumas Regency." *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences* 9, no. T5 (2022): 162–70. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.7819>.
- Tjitrawati, Aktieva Tri, and Mochamad Kevin Romadhona. "Affliction in the Post Palu Disaster: State Failure to Implement Human Rights Standard on Disaster



Management.” *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (2023).
<https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2233255>.

Trisnawati, Arti Novelia, Dina Sunyowati, and Setya Heksama. “Legal Protection Disaster Response Volunteers (PERKA Study No. 17 of 2011 Regarding Disaster Management Volunteer Guidelines).” *Airlangga Development Journal* 7, no. 1 (2022): 66–85. <https://doi.org/10.20473/adj.v7i1.34897>.

Widowati, Dyah Ayu. “Disaster Mitigation in Coastal Areas: Perspective of the Indonesian Spatial Planning Law.” *Jurnal Media Hukum* 29, no. 1 (2022): 79–93. <https://doi.org/10.18196/jmh.v29i1.14685>.

Yudit Bertha Rumbawer, Donny Eddy Sam Karauwan, and Anthon Rumburen. “Ambiguitas Keputusan Administrasi Negara : Antara Diskresi Dan Legalitas.” *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2024): 52–63. https://doi.org/10.35905/sultan_htn.v2i2.9569.

Zweigert, K., & Kötz, H. *An Introduction to Comparative Law (3rd Ed.)*. London: Oxford University Press, 1998.